

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

# Warga Huni Paksa KSB Potensi Pelanggaran Hukum

**JAKARTA (Poskota)** - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta warga eks Kampung Bayam tidak memprovokasi demi tinggal di Kampung Susun Bayam (KSB), Jakarta Utara. "Jangan ada pihak yang ngomporin, kasih an warga. Saya mengikuti secara detail loh," ujar Heru kepada wartawan di Jakarta Timur, Selasa (20/12/2023).

Heru mengatakan, Pemprov DKI sudah memberikan perhatian kepada warga dengan memfasilitasi tempat tinggal setelah diminta lagi tak bermukim di Kampung Bayam. "Sudah diberikan waktu, disampaikan, disuruh pilih mau (tinggal di rumah susun) di mana. Di (Rusun) Nagrak itu kan bagus, kamarnya dua, ruang tamu, dapur, teras air bersih ada, listrik ada," ucap Heru.

Karena itu, Heru menyerahkan ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengenai persoalan warga Kampung Bayam yang memaksa tinggal di KSB. "Ya kami serahkan ke PT Jakpro untuk selesaikan secara hukum," ujar Heru. Tidak Punya Hak

Sekretaris Daerah (Sek-

da) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menambahkan, warga yang menghuni paksa KSB tidak mempunyai hak untuk menempati tempat tersebut. Sebab, warga eks penghuni Kampung Bayam sudah mendapatkan kompensasi atau biaya pengganti ketika tempat tinggal mereka terdampak penggusuran.

"Hak warga kan sudah diberikan, kalau hak warga sudah diberikan masa dia minta lagi, ya enggak bisa dong. Harus ditinggalkan (KSB)," ujar Joko saat dikonfirmasi, Rabu (20/12/2023).

Joko menegaskan, tidak boleh ada pihak manapun yang menerobos dan menghuni paksa Kampung Susun Bayam dengan alasan apapun. Menurut dia, ada potensi pelanggaran hukum ketika sejumlah warga menghuni paksa Kampung Susun Bayam yang menjadi salah satu aset PT Jakpro.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun mendukung langkah Jakpro untuk menindak pihak-pihak yang terbukti menghuni paksa Kampung Susun Bayam. "Ya enggak boleh dong

kalau ada kelompok yang memaksa masuk (Kampung Susun Bayam)," kata Joko. "Jakpro menggandeng kepolisian kami tahu. Karena dia, warga yang menghuni KSB secara paksa melakukan pelanggaran," sambungnya.

Untuk diketahui, warga eks Kampung Bayam itu merupakan korban pembebasan lahan dari proyek pembangunan JIS. Semestinya, warga Kampung Bayam itu menghuni Kampung Susun Bayam (KSB). Namun, janji Pemprov DKI Jakarta tak kunjung terealisasi karena status lahan.

Warga yang tidak sanggup membayar kontrakan akhirnya mendirikan tenda di depan JIS. Eks warga Kampung Bayam yang tinggal di tenda akhirnya direlokasi ke Rusunawa Nagrak pada 26 Oktober 2023, untuk sementara waktu.

Pemindahan warga karena lahan yang diduduki itu akan digunakan sebagai persiapan Piala Dunia U-17. Meski begitu, warga eks Kampung Bayam itu tetap menuntut untuk tinggal di Kampung Susun Bayam. (\*/ham)